



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN TINDAKAN ANARKIS OLEH MASYARAKAT YANG MELAKUKAN UNJUK RASA (Studi Kasus di Polresta Padang)

SKRIPSI



WAHYU FEBRIO NANDA
07940121

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

Dengan nama ALLAH
Yang Maha Pengasih lagi Penyayang
Tiada daya dan upaya melainkan
Kesabaran dan Kekuatan dari-Nya...

Puji dan Syukur hamba panjatkan kepada ALLAH SWT
Atas segala limpahan Karunia-Nya
Sehingga hamba dapat meraih segenggam asa dan cita
Dari kehidupan ini...

Kupersembahkan karya ini untuk
Ayahanda Syaiful Zainuddin, SH dan Ibunda Hj. Yuliarti
Yang senantiasa sabar dalam mendoakan, mendukung, dan
Menyemangati ananda sehingga terciptalah sebuah karya kecil ini,
Semoga karya ini dapat menjadi setetes embun yang dapat
membahagiakan hati Ayahanda dan Ibunda tercinta...
Karya ini juga kupersembahkan untuk "My Little Brother" Rendi Prasetyawan
Yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyusun karya ini...

Terima kasih kepada "RIK"
Atas semangat, dorongan & doanya...

Terima kasih kepada MAPALA GREEN JUSTICE Fakultas Hukum
Universitas Andalas... "Alam adalah ibu yang tidak pernah mati, Salam Lestari !!!"
Angkatan XVII : Asti, bobo, dina, mayang, topan, lebe, topan & sampai...
Angkatan XVI, XV, XIV, XVIII, XIX & Seluruh kel besar MGJ & FKGGJ
Yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu...
Terima kasih atas kekeluargaan, kenangan, & harapannya...

Terima kasih buat bg Hameed, Arie, Andi..
Terima kasih buat teman - teman seperjuanganku...Arya, ijonk, didi, rendi, satria, dede, dani,
Agung, tiong, dipsy, riki "bulu", dika, madio, dino, abet,
Dan semua teman-teman angkatan 2007 yang tak bisa disebutkan namanya
Satu persatu....

Ya Allah...
Ini bukan lah akhir Perjalananku,
Namun ini merupakan gerbang perjalanan hidupku yang sesungguhnya...
Berilah hamba ridho-Mu, kekuatan-Mu, dan petunjuk-Mu
Dalam menjalani hari setelah ini...

BIODATA

Penulis dilahirkan di Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 19 Februari 1990 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Syaiful Zainuddin dan Ibu Yuliarti. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 11 Lapai Pariaman pada tahun 2001, Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah menengah pertama di MTsN Padusunan Pariaman dan tamat tahun 2004. Penulis menyelesaikan sekolah menengah atas di SMAN 2 Pariaman tahun 2007. Lalu penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum jurusan Hukum Pidana .

Padang, Agustus 2012

Penulis



KATA PENGANTAR

Puja dan pujian serta rasa syukur ini hanya teruntuk atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan Salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, memberikan suri teladan hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi yang berjudul **PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN TINDAKAN ANARKIS OLEH MASYARAKAT YANG MELAKUKAN UNJUK RASA (Studi Kasus Di Polresta Padang)** ini diselesaikan dan diajukan penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi, penulisan, dan penyajiannya sehingga penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta memiliki relevansi dengan tulisan ini.

Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materil selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Teristimewa atas kasih sayang yang telah diberikan oleh keluarga tercinta, Ayahanda Syaiful Zainuddin,SH dan Ibunda Hj. Yuliarti banyaknya memberikan nasehat dan masukan-masukan kepada penulis.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak **Yoserwan, S.H.,M.H.,LLM** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas,
3. Bapak **Frenadin Adegustara, S.H.,M.S** selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Bapak **Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.H** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak **Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan, arahan dan pikiran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu **Nelwitis, SH.,MH** selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Ibu **Hj. Efren Nova, S.H.,M.H** selaku Pembimbing II yang telah membantu memberikan uluran tangannya ikut meluangkan waktu dan memberikan pikiran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta seluruh staf Biro dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

9. Keluarga besar **MAPALA GREEN JUSTICE** Fakultas Hukum Universitas Andalas padang, kepada angkatan XVII, MGJ.189 BOLENG . MGJ.190 SIMPAI . MG 191 TIJE. MGJ.192 LEBE. MGJ 193 KUTILANG . MGJ 194 BANGO. MGJ 196 LUMADA.
10. Terima kasih MAPALA GREEN JUSTICE telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang di berikan kepada saya yang tidak saya dapatkan di perkuliahan .ALAM ADALAH IBU YANG TIDAK PERNAH MATI , SALAM LESTARI !!
11. Senior **FKGJ (Forum komunikasi GREEN JUSTICE)** terima kasih atas doa dan dukungan nya .

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua

Padang, 25 Juli 2012

Penulis

**PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENYELESAIKAN TINDAKAN ANARKIS OLEH
MASYARAKAT YANG MELAKUKAN UNJUK RASA
(Studi Kasus Di Polresta Padang)**

**(Wahyu Febrio Nanda, 07940121, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 2012, 62 hlm)**

A B S T R A K

Di dalam Undang-Undang juga memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang”. Adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi akhir-akhir ini terjadinya unjuk rasa di mana-mana di seluruh Nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya di rasakan oleh masyarakat itu sendiri. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang menuntut peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta – fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang penulis bahas adalah 1) Bagaimana peranan kepolisian dalam menyelesaikan tindakan anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa? 2) Bagaimana bentuk-bentuk tindakan anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa? 3) Apakah kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengamankan tindakan unjuk rasa? . Hasil penelitian yang dilakukan: peranan kepolisian dalam tindakan anarkis adalah polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban, Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran dalam unjuk rasa/demonstrasi adalah akan memproses secara hukum si pelaku dan kalau terbukti melakukan penganiayaan akan ditahan dan selanjutnya diminta keterangan tentang seputar penganiayaan yang telah dilakukan, selanjutnya dibuatkan P21 dan diserahkan kepada. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa yaitu kendala intern dan ekstern. Kendala intern yaitu lebih sedikitnya jumlah personil POLRI yang mengamankan unjuk rasa dibandingkan massa yang melakukan unjuk rasa. Kendala ekstern yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari masyarakat. Disarankan kepada pemerintah agar mensosialisasikan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 agar masyarakat tahu tata cara dalam menyampaikan pendapat dan Pemerintah dapat menambah jumlah personil POLRI serta sarana dan prasarana yang dapat mengantisipasi tindakan anarkis.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	6
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Tugas dan Wewenang POLRI	11
B. Tinjauan Umum Tentang Unjuk Rasa dan Anarkis	
1. Pengertian Unjuk Rasa dan Anarkis.....	16
2. Unjuk Rasa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum.....	25

3. Unjuk Rasa Sebagai Kebebasan Mengeluarkan

Pendapat di Negara Demokrasi.....	30
-----------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Terhadap Tindakan Anarkis

Yang Dilakukan Oleh Para Pengunjuk Rasa.....	38
--	----

B. Bentuk-Bentuk Tindakan Anarkis ang Dilakukan Oleh

Para Pengunjuk Rasa	46
---------------------------	----

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam

Mengamankan Tindakan Unjuk Rasa	57
---------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
--------------------	----

B. Saran	62
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

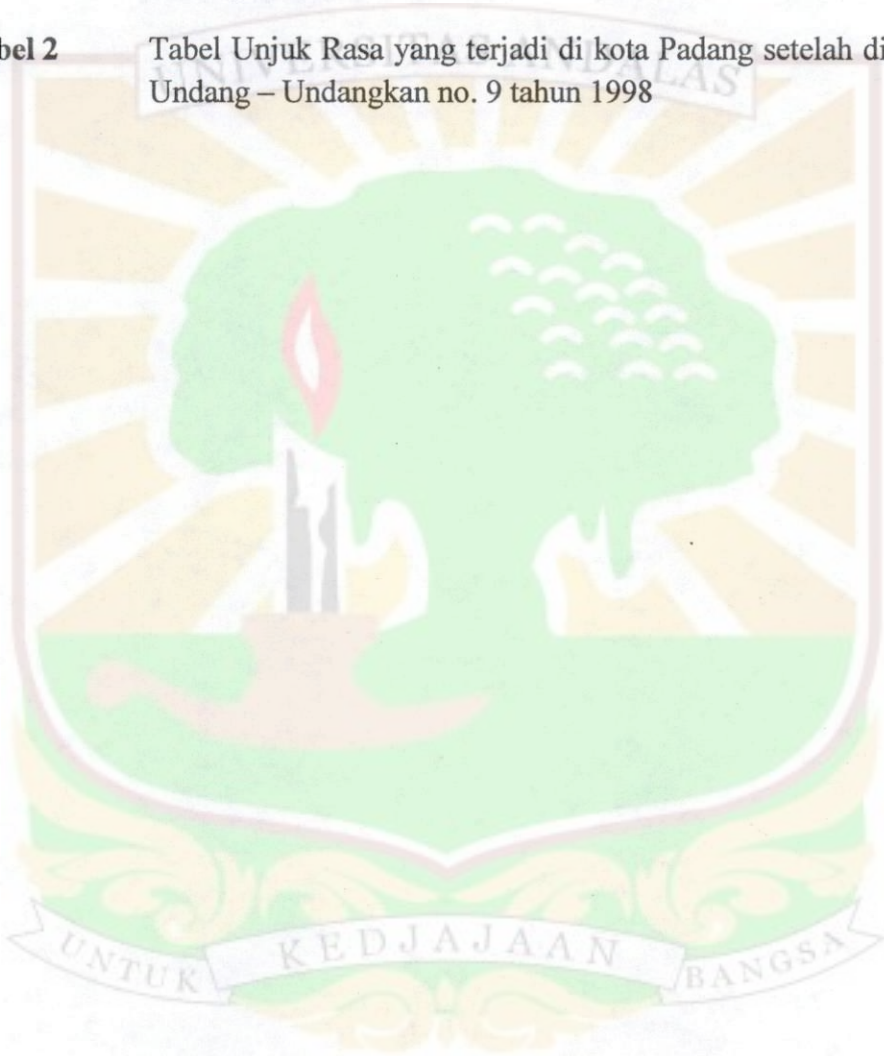
DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 2** Surat Rekomendasi Fakultas Untuk Penelitian
- Lampiran 3** Surat Rekomendasi Dari Kesbangpollinmas Kota Padang untuk melakukan penelitian
- Lampiran 4** Surat Keterangan selesai penelitian dari POLRESTA Padang
- Lampiran 5** Data unjuk rasa bulan Januari dan Februari 2012 di kota Padang



DAFTAR TABEL

- Tabel 1** Tabel kasus unjuk rasa yang berakhir damai di kota Padang tahun 2012
- Tabel 2** Tabel Unjuk Rasa yang terjadi di kota Padang setelah di Undang – Undangan no. 9 tahun 1998



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.¹

Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang mempunyai hak untuk menerima atau menolak suatu penetapan atau keputusan yakni keputusan yang timbul dari badan hukum publik maupun badan hukum privat apabila keputusan itu merugikan orang individu dan masyarakat.

¹ Undang-Undang Dasar 1945

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan pada demokrasi Pancasila. Di dalam Undang-Undang juga memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang”².

Adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi akhir-akhir ini terjadinya unjuk rasa di mana-mana di seluruh Nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya di rasakan oleh masyarakat itu sendiri.³

Pada era reformasi saat ini, banyak masyarakat yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi untuk mengungkapkan ketidaksenangan dan protes terhadap suatu kebijakan baik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atau pihak swasta lainnya.

Unjuk rasa dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai spirit demokrasi negara Republik Indonesia.

² Abdul Karim, 1995, *Penuntun Belajar PPKN*, Ganeca Exact: Bandung.

³ Kunarto, 1999, *Merenungi Kiprah Polri Menghadapi Gelora Anarki 2*, Cipta Manunggal: Jakarta, hlm. 113

Unjuk rasa sering kali berujung anarkis karena masyarakat yang melakukan unjuk rasa tidak dapat mengontrol diri. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya salah persepsi dalam melakukan unjuk rasa tersebut, maka mereka selalu merugikan dan meresahkan masyarakat sekitarnya dan orang-orang sifatnya menghasut sehingga menimbulkan rasa benci untuk menjadikan keadaan itu tidak terkendali atau yang sering disebut dengan provokator.

Menurut mereka unjuk rasa adalah suatu kebebasan untuk mengeluarkan pikiran secara lisan yang sebebas-bebasnya. Contohnya seperti penolakan pembubaran kios-kios pedagang di pasar raya Padang yang mengakibatkan banyak terjadi kerusakan terhadap kios-kios tersebut.

Untuk mengamankan unjuk rasa tersebut, maka peranan kepolisian sangatlah penting dalam menjaga kestabilan keamanan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1 huruf (e) yang berbunyi, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan masyarakat bangsa dan negara Indonesia.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang disahkan 26 Oktober 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, maka kepolisian diharapkan mampu menanggulangi maraknya unjuk rasa dewasa ini, oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas maka penulis memutuskan untuk memilih judul tentang:

“Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menyelesaikan Tindakan Anarkis Oleh Masyarakat Yang Melakukan Unjuk Rasa”.

B. Rumusan Masalah

Dalam hal ini selanjutnya penulis akan memberikan pembatasan sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak dibahas, sehingga akan sesuai dengan penulisannya. Adapun permasalahan yang akan dibahas dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam menyelesaikan tindakan anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengamankan tindakan unjuk rasa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menyelesaikan tindakan anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa;
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa;
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengamankan tindakan unjuk rasa

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan faedah atau manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dibidang Hukum, khususnya Hukum Pidana;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada Masyarakat pada Umumnya dan kalangan akademisi yang menggeluti Hukum Pidana pada khususnya;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi terhadap Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian tindakan anarkis oleh masyarakat yang melakukan unjuk rasa;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan bahan kajian untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terkait dengan Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian tindakan anarkis oleh masyarakat yang melakukan unjuk rasa;

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui pentingnya Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian tindakan anarkis oleh masyarakat yang melakukan unjuk rasa.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber.

1. Bahan atau Materi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data antara lain:

a. Data primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui penelitian lapangan (*field reseach*), Dalam hal ini penelitian dilakukan di Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti bahan-bahan yang berkaitan dengan rumusan penulis.
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti :
 - a) Hasil-hasil penelitian;
 - b) Teori-teori hukum dan pendapat sarjana;
 - c) Karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya
- 3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia

b. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan data yang digunakan dalam perbuatan hukum, seperti data unjuk rasa yang terjadi di kota Padang yang ditindaklanjuti oleh Polresta Padang.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden yang terkait dengan unjuk rasa di pasar raya Padang. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan pokok yang dikembangkan waktu wawancara.

c. Analisa Data

Semua data yang terkumpul baik berupa data sekunder maupun data primer akan dianalisis secara kualitatif, yaitu mengumpulkan data menurut aspek-aspek yang diteliti diambil suatu kesimpulan dengan atau tanpa menggunakan angka-angka statistik.

F. Kerangka konseptual dan kerangka teoritis

a. Kerangka konseptual

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dikatakan bahwa POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di dalam melaksanakan tugas di lapangan POLRI sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau keadaan yang mendesak seperti halnya jika terjadi tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati / menjunjung tinggi hak azazi manusia.

b. Kerangka teoritis

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik secara fungsi atau organ

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 butir 1, Unjuk rasa atau kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsururkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangnya harus dihilangkan/dihancurkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Tugas dan Wewenang POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sedangkan pengertian Polri itu sendiri adalah singkatan dari “Polisi Republik Indonesia”. Dan selanjutnya penulis mengupas lebih rinci mengenai kata “Polisi” itu sendiri. Dari perkembangannya berasal dari kata Polis yang artinya negara. Pada zaman Yunani kuno kata Polisi ini berkembang istilah negara Polisi atau negara jaga aman pada abad XIX. Istilah polisi diartikan secara luas sekarang yang dikatakan Polisi yakni “Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum yaitu pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya”. Kepolisian artinya segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi atau singkatan urusan Polisi.⁴

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik secara fungsi atau organ. Pada dasarnya polisi lahir bersama rakyat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesep, katan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan

⁴ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm

perilaku dan perilaku kriminal dari warga masyarakat. Ketika masyarakat sepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).⁵

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dicantumkan secara tegas tugas dan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b. Menegakkan Hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Pasal 14 (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara RI bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

⁵Bibit Samat Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Masyarakat*, Restu Agung: Jakarta, hlm.36

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
- l. Melaksanakan tugas lain dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian, menyatakan:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 kepolisian negara republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan ;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat ;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian ;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan ;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian ;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang ;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti ;
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional ;
 - k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat ;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian ;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional ;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional ;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang telah diberikan berdasarkan UU serta fungsi kepolisian yang melekat yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, pembimbing dan pelayan masyarakat dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki, maka POLRI membangun suatu upaya-upaya untuk melakukan penanggulangan setiap gangguan Kamtibmas sekaligus mewujudkan profesionalisme dengan melaksanakan strategi-strategi.⁷

⁷ Yahya Harahap, 1987, *Pembahasan KUHAP*, Sinar Grafika, Bandung, hlm 80.

1. Strategi Deteksi Dini (*early warning detection*)

Merupakan upaya dan langkah awal untuk memperoleh dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin data dan keterangan dari segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (ipoleksosbudhankam) diolah dan dianalisis untuk disusun dalam suatu prediksi intelligent terhadap setiap kemungkinan yang akan terjadi.

2. Strategi Pre-Emptive (*to win the heart of the people*)

Merupakan upaya proaktif dan interaktif dalam rangka pembinaan, penataan dan pemanfaatan potensi masyarakat dalam upaya dalam merebut simpatik rakyat.

3. Strategi preventif (*prevention is better than cure*)

Merupakan upaya yang bersifat pencegahan dan pengendalian terhadap setiap bentuk-bentuk ancaman gangguan Kamtibmas dengan memberikan pengadangan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Strategi represif (*fight the crime, love humanity and help delinquent*)

Merupakan upaya yang bersifat penegakan hukum dengan menjamin tegaknya hukum, tertib hukum yang dilaksanakan dengan tegas, profesional dan tuntas dengan tetap menjunjung tinggi HAM (hak Asasi Manusia).

5. Strategi rehabilitasi (*Law Abiden Citizen*)

Merupakan upaya untuk memulihkan akibat atau dampak yang timbul dari suatu peristiwa atau strategi lainnya sehingga keadaan atau kondisi

dapat dipulihkan kembali, oleh karena itu strategi ini dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki oleh POLRI.

6. Strategi penataan pelaksanaan tugas operasional kepolisian

Merupakan upaya untuk melakukan penataan kembali penyelenggaraan operasi-operasi khusus kepolisian dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada POLRI (Mandiri atau kewilayahan) dalam menentukan prioritas sasaran operasi sesuai target operasi yang didasarkan atas karakteristik daerah masing-masing.

Dari strategi yang dibangun oleh POLRI tersebut, maka upaya represif pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan setelah menggelar strategi preventif, preventif tetapi masih tetap pelanggaran hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Unjuk Rasa dan Anarkis

1. Pengertian Unjuk Rasa dan Anarkis

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. Pawai;
- c. Rapat umum; dan atau
- d. Mimbar bebas.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Ilmiah Populer, pengertian Unjuk Rasa adalah tindakan bersama untuk menyatakan protes, pertunjukan mengenai cara-cara penggunaan suatu alat atau pameran.⁸

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum, menyatakan bahwa:

“Unjuk rasa atau kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁹.

1. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh Empat Jam) sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku dalam kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak mengatur tentang syarat-syarat penyampaian pendapat, tapi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan.¹⁰ Pendapat Di Muka Umum terdapat tata cara penyampaian pendapat di depan umum atau demonstrasi antara lain :

1. Penyampaian pendapat di muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri;

⁸ Pius Partanto, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkolo Surabaya, hlm 100.

⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum.

2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.

Apabila setiap masyarakat merasa haknya dilanggar maka masyarakat berhak mengeluarkan pendapatnya dengan cara unjuk rasa asal tidak melanggar dan wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pembahasan lebih lanjut tentang suatu fenomena yang sering timbul di dalam masyarakat satu ketegangan karena masyarakat merasakan kesulitan mencapai suatu nilai yang hendak dicapai. Ketegangan yang paling berat dirasakan adalah harapan mencapai nilai lebih, sedangkan nilai kesanggupan tidak memungkinkan hal ini yang mengakibatkan frustrasi.

Dalam prakteknya, banyak aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan yang mengarah pada anarki. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam dan luar pengunjuk ras itu sendiri. Kerusuhan yang terjadi yang berujung pada terjadinya beberapa tindak pidana. Tindakan ini akan mengganggu ketertiban umum dan akan dapat mengancam keamanan Negara. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang

dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.¹¹

Unjuk rasa dewasa ini menjadi khasanah peristiwa sehari-hari. Korban berjatuh menyalak cara-cara penanggulangan oleh pihak keamanan yang kadang-kadang kelewatan. Demonstrasi atau unjuk rasa atau unjuk keprihatinan atau unjuk pendirian, unjuk kepedulian tetap dan terus mengumandangkan tuntutan-tuntutan pebaharuan.

Dalam hal ini kita juga sering menanyakan kenapa diminta pembaharuan sistem. Alasannya karena sistem atau tata kehidupan bersama jauh lebih mendasar dan jauh lebih mendalam kepentingannya daripada sekedar perkara. Oleh karena itu tata kehidupan yang baik menunjuk bukan pada sistem yang membuat setiap orang dapat mencari makan, melainkan yang bisa menjamin setiap orang sanggup bertanggung jawab atas dirinya mengabaikan adanya kondisi-kondisi kehidupan dimana seseorang mampu memenuhi dan menentukan pilihan kebutuhannya sehari-hari.

Maka dibalik rangkaian demonstrasi atau unjuk rasa disini hendak ditampilkan secara langsung perjuangan membela keluhan martabat manusia.¹²

Pembaruan tentang kehidupan yang menunjuk pada pembelaan keluhuran manusia yang mencakup perlu segera dijaminnya kepastian

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana: Jakarta, hlm.10-11

¹² Dedy Djamiludin Malik, 1998, *Gejolak Reformasi Menolak Anarki*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, hlm 315

hukum, ditegakkannya hak-hak dasar manusia terutama yang lemah, didengarkannya jeritan dan teriakan mereka yang lapar dan mereka yang kehilangan pekerjaan, dihargainya keprihatinan dan kepedulian masyarakat banyak, dihormatinya keadilan dan partisipasi kehidupan politik, dikedepankannya tekad dan kehendak tulus akan perubahan.

Alasan unjuk rasa bukan sekedar perkara makan, aneka gerakan berupa warung murah atau cinta rupiah atau yang semacamnya yang tidak pernah menjawab akan persoalan dan diri sendirinya juga tidak pernah memadamkan unjuk keprihatinan sejauh pembaharuan tidak dijalankan.¹³

Pembaharuan tata kehidupan secara konkrit hampir selalu disertai dengan korban dan rasa sakit. Tetapi tidak perlu dipandang berlebihan jika pembaharuan sistem tersebut juga akan menyentuh pihak yang bertanggung jawab dalam penataannya. Pembaharuan tata kehidupan berpolitik memang hampir tidak mungkin dibayangkan jika aparat penatanya tidak baru. Mengapa para eksperimen deomonstrasi tetap mendekat kendati korban-korban telah berjatuhan? Alasannya sangat mendalam, mereka sedang memperjuangkan keseluruhan martabatnya sendiri. Kematian dan bahaya tidak akan pernah menghadang siapapun yang meyakini perjuangan martabatnya sendiri yang luhur.

¹³ *Ibid*, hlm 316

Seringkali aneka unjuk keprihatinan mereka terasa berlebihan, kasar, brutal, tetapi kesadaran terdalam dari gerakan unjuk keprihatinan menyentuh pada perkara hati nurani. Orang harus bisa membedakan antara ungkapan kesadaran dan kesadarannya itu sendiri atau antara ekspresi terluar dan intensi dalam nurani manusia.¹⁴

Dalam sejarah peradaban manusia, tidak setiap pemerintah politik cepat menangkap atau memenuhi tentang unjuk keprihatinan. Kelambanan dalam menangkap unjuk keprihatinan kerap kali dicetuskan dalam ungkapan pemakluman bahwa kroban-korban yang berjatuh dianggap biasa, normal, lumrah dalam suatu revolusi. Dan negara-negara lain juga mengalami hal yang tidak berbeda bahwa negara-negara barat membutuhkan ratusan tahun untuk menegakkan demonstrasi yang sejati, sedangkan kita baru setengah abad merdeka, bahwa pembaharuan membutuhkan proses yang rumit dan panjang.

Sedangkan bentuk-bentuk pemerintahan politik yang tidak mau memahami unjuk keprihatinan rakyatnya pada umumnya memiliki pandangan yang seragam. Unjuk keprihatinan membahayakan kekuasaan. Sikap dan unjuk keprihatinan diungkap dengan berbagai tindakan penculikan, kambing hitam, pemberantasan dengan kekerasan dan semacamnya.

Pada zaman monarki bangsa inggris memiliki salam bagus untuk ratu mereka yang mana salam ini bukan sekedar doa agar tuhan

¹⁴ *Ibid*, hlm 316

senantiasa melindungi sang ratu, melainkan kesadaran bahwa kekuasaan ratu berasal dari tuhan, karenanya tidak boleh digoyahkan oleh ancaman siapapun kecuali oleh tuhan.

Pemerintah yang menganut pemerintahan idiologis komunis yang pada akhirnya adalah pemerintahan diktator kaum proletar (rakyat biasa). Setiap pemerintahan diktator pasti tidak pernah sedikitpun lengah terhadap setiap hal yang dianggap mengancam kekuasaan¹⁵

Juga bentuk pemerintahan yang memegang teguh terhadap konsep stabilitas melulu dalam arti pokoknya tidak ada konflik atau kritik terhadap kategori yang tidak mengindahkan unjuk keprihatinan rakyatnya. Setiap pemerintahan semacam ini bukan hanya kaku, melainkan juga represif dalam mengatasi partisipasi politik rakyatnya. Setiap kritik perbedaan pikiran dan diskusi politik hampir tidak pernah luput dari konteks bingkai kecurigaan membahayakan stabilitas dan keamanan.¹⁶

Hubungan keprihatinan dan hati nurani sangat erat terlebih dewasa ini kekuatannya harus diakui karena banyak orang mulai sibuk dengan mementingkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya. Beberapa kalangan terdesak mencoba mencari keselamatan bagi dirinya sendiri sebagian besar yang lain tertindih dan terlepas, karena tidak ada kepastian urusan hukum dalam kerusuhan dan ketidakadilan.

¹⁵ *Ibid*, hlm 317

¹⁶ *Ibid*

Tindakan hati nurani solidaritas kesetia kawan sosial, saling membantu, empati, simpati bagi seluruh masyarakat dari segala golongan, suku dan agama sudah tidak boleh lagi sekedar basa-basi.

Hal serupa juga bagi para penanggung jawab keamanan. Bagi para penentu bangsa, para wakil terpilih menyuarkan rakyat, mendengarkan hati nurani berani menegaskan pembaharuan sistem kehidupan secara tegas dan segera.

Disamping itu “anarki” seringkali digunakan secara luas untuk menggambarkan suatu keadaan yang tak beraturan dan membingungkan, dengan maksud untuk mengaburkan kebenaran.¹⁷

Definisi masyarakat umum akan kata “anarkis” dapat dengan mudah dijelaskan. Manusia, seperti halnya makhluk hidup lain, beradaptasi dan menyesuaikan dirinya dengan kondisi tempat ia hidup dan atas dasar adat perilaku yang berlaku. Jadi, manakala ia terlahir dan dibesarkan di dalam batasan, jika ia merupakan garis keturunan dari budak, ia akan berpikir bahwa perbudakan itu merupakan kondisi perlu dalam kehidupan dan kemerdekaan tampak tak mungkin bagi mereka.

Hal serupa juga berlaku bagi para buruh yang telah berabad-abad dibebani dan oleh karenanya menyesuaikan diri untuk bergantung pada pekerjaan, yakni pada upah, pada kebaikan hati si tuan, dan melihat bahwa hidupnya selalu bergantung pada kebaikan hati si tuan yang memberinya makan, dan tak tertarik untuk bertanya pada orang

¹⁷ Lihat [http:// www.google.pustaka.otonomis.org/asal-kata-anarkisme.com](http://www.google.pustaka.otonomis.org/asal-kata-anarkisme.com), di akses tanggal 12 desember 2011

bagaimana mungkin mereka bisa hidup jika tak ada tuan-tuan tersebut, maka, sejak pemikiran bahwa pemerintah itu penting dan kondisi tanpa pemerintah maka dari itu hanyalah keadaan kacau dan membingungkan, maka amatlah wajar dan logis bahwa anarki, yang berarti absennya pemerintah, akanlah kedengaran seperti absennya keteraturan.

Beberapa kali dan di beberapa negara dimana masyarakat percaya akan dibutuhkannya pemerintah yang dijalankan oleh satu orang (monarki), kata “Republik” yang artinya pemerintah dijalankan oleh orang banyak dianggap sebagai suatu yang kacau dan membingungkan dan pengertian ini masih dapat bisa ditemukan dalam bahasa populer di hampir setiap negara. Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.¹⁸

Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administratif, Anarki berarti koordinasi dan pengelolaan, tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam wilayah ekonomi, politik dan administratif (baik pada ranah publik maupun privat).

¹⁸ Lihat <http://www://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme>, diakses tanggal 04 januari 2012

2. Unjuk Rasa Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998

tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di muka umum , menyatakan:

“Unjuk rasa atau kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, sebagai berikut :

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945,
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat
3. Mewujudkan iklim dan kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreatifitas setiap warga sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi,
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.”

Maksud dari tujuan tersebut bagaimana negara memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia umum juga diiringi dengan tanggung jawab dari individu tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat tercipta suasana kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas warga negara dalam keikutsertaannya untuk mewujudkan suasana yang demokratis.

Seperti yang telah disinggung diatas, setiap warga negara yang akan menyelenggarakan unjuk rasa mempunyai hak dan kewajiban yang mestinya harus dipatuhi. Hak dan kewajiban diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Hak-hak yang dimiliki warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yakni mengeluarkan pikiran secara bebas dan, memperoleh perlindungan hukum, sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum antara lain menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan untuk aparat pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia; menghargai asas legalitas; menghargai

prinsip praduga tak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan. (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum). Selain hak dan kewajiban para demonstran dan para aparat penegak hukum Undang-Undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum juga mengatur mengenai pemberitahuan kepada aparat Kepolisian ini.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum ini sebelum melakukan kegiatan diharuskan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Hak ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat umum, antara lain sebagai berikut:

1. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok;
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat;
3. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus diperhatikan oleh para pengunjuk rasa. Jadi setiap warga negara yang akan menyelenggarakan unjuk rasa mempunyai hak dan kewajiban diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengeluarkan

pendapat di muka umum. Hak-hak yang dimiliki warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yakni mengeluarkan pikiran di muka umum antara lain menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain., menghormati aturan-aturan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, untuk pihak penegak hukum atau kepolisian mempunyai kewajiban untuk melindungi:

1. Hak Asasi Manusia;
2. Menghargai asas legalitas;
3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah;
4. Menyelenggarakan pengamanan.

Sebagai suatu contoh dapat ditemukan bahwa baru-baru ini ditangkap delapan pengunjuk rasa oleh Polres Metro Jaya pada tanggal 5 Desember 2010 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka *The 2nd International Junior Science Olympiade* di Jakarta, karena mereka dianggap bisa mengganggu ketertiban umum. Mereka melakukan unjuk rasa tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak kepolisian.¹⁹

¹⁹ Harian Umum Media Indonesia, *Unjuk Rasa Ormas*, Jakarta, 6 Desember 2010, hlm.

Menjadi sangat dilematis ketika kebebasan mengeluarkan pendapat yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari konstitusi ternyata dibatasi oleh undang-undang. Namun bukankah Undang-Undang justru ingin mengatur agar jalannya unjuk rasa tidak berjalan secara anarkis seperti apa yang pernah terjadi pada pertengahan tahun 1998, dimana unjuk rasa berubah menjadi aksi anarkis yang mengakibatkan kerugian harta maupun nyawa.

Disadari atau tidak bahwa kebebasan berekspresi yang terjadi saat ini telah menimbulkan pemahaman yang sedikit melenceng dari yang sebenarnya. Pemahaman yang selama ini berkembang bahwa pada masa reformasi ini kebebasan dikeluarkan dengan sebebaskan-bebasnya sesuai dengan kehendak masing-masing individu tersebut tanpa ada pembatasan-pembatasan apapun juga perlu disadari bahwa undang-undang tidak membatasi adanya kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum akan tetapi undang-undang bermaksud menjaga tertib sosial yang telah tercipta di masyarakat. Mengenai pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa adanya pemberitahuan sebelum pelaksanaan demonstrasi merupakan bentuk pengekangan, dari kemerdekaan berekspresi, tidak sepenuhnya benar karena dengan adanya pemberitahuan tersebut aparat keamanan atau kepolisian justru harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap para demonstran maupun pengamanan terhadap keamanan dan ketertiban

umum terutama di sekitar lokasi yang digunakan untuk kegiatan unjuk rasa.

3. Unjuk Rasa Sebagai Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Negara Demokrasi

Di zaman modern seperti sekarang ini pada umumnya hampir semua negara menyatakan dirinya sebagai negara bersistem demokrasi, termasuk Republik Indonesia yakni sistem pemerintah yang bersumber pada Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat merupakan paham kenegaraan yang menjabarkan dan pengaturannya dituangkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara, dan penerapan selanjutnya disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat negara yang bersangkutan.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan Demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidaklah sama.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi menghormati serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Unjuk rasa masyarakat adalah merupakan suatu perwujudan suatu negara yang berdasarkan demokrasi. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang sudah di Amandemen Tahun 2000 berbunyi :

“ Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut undang-undang”.

Dari undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap warga negara mempunyai hak asasi di bidang politik yang merupakan perwujudan hak-hak asasi demonstrasi dalam menentukan suatu kehendak sebagai warga negara.²⁰

Pada saat sekarang ini hak asasi dimaksudkan dalam berhadapan dengan tindakan-tindakan yang secara kasar bertentangan dengan keadilan terutama berhadapan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menentang kekuasaan negara dengan menolak ketaatan atau dengan kekerasan, perlu diperhatikan bahwa hak perlawanan justru mengakui perlu adanya tatanan hukum dan kekuasaan yang menjamin keberlakuannya. Perlawanan hanya dapat dibenarkan dalam keadaan ekstrim dimana kekuasaan Negara mendukung ketidakadilan yang justru bertentangan dengan citra hukum yang paling fundamental.

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada umumnya sekarang ini hampir semua negara menyatakan dirinya sebagai negara bersistem demokrasi, artinya sistem demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Penguasa atau pemerintah dipilih oleh rakyat, apabila ada keinginan rakyat yang tidak terpenuhi maka rakyat menuntut untuk dipilih diantaranya dengan mengadakan tuntutan, termasuk Republik Indonesia yakni sistem pemerintahan yang bersumber pada Kedaulatan Rakyat merupakan paham kenegaraan yang menjabarkan dan pengaturannya dituangkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara.

Spirit kerakyatan yang menjadi watak Negara demokrasi merupakan syarat utama dalam format Negara yang berkedaulatan rakyat, karena kekuatan tertinggi terletak di tangan rakyat. Kesetaraan martabat dan persamaan hak politik mengindikasikan tentang kesamaan hak politik dari setiap warga Negara lebih dari itu, Negara demokrasi tidak bisa tidak harus menunjukkan adanya kebebasan berfikir, menyatakan pendapat dan aksi dalam urusan politik. Termasuk hal pendapat akses untuk informasi politik serta kebebasan untuk mendiskusikan dan mengkritik figur politik dalam negara demokrasi selain menghargai mayoritas, juga pelaksanaan kekuasaan harus dipertanggungjawabkan dan responsif terhadap aspirasi rakyat..

Prof. Amin Rais memaparkan adanya sepuluh kriteria demokrasi yakni :²¹

1. Partisipasi dalam membuat keputusan.
2. Persamaan di depan hukum.
3. Distribusi pendapatan secara adil.
4. Kesempatan pendidikan yang sama.
5. Empat macam kebebasan yaitu, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratan kabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama.
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi.
7. Mengindahkan etika politik.
8. Kebebasan individu.
9. Semangat kerjasama.
10. Hak untuk protes.

Sistem pemerintahan demokrasi mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu :

1. Keterlibatan warga negara tertentu dalam pembuatan keputusan politik
2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara

²¹ Lihat [http // www.google.com/ kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum](http://www.google.com/kebebasan_mengeluarkan_pendapat_di_muka_umum), Diakses tanggal 11 januari 2012.

3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara
4. Suatu sistem peradilan
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Dari pendapat beberapa pakar diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi terdapat adanya pengakuan dari negara bahwa setiap warga negara dapat secara bebas mengeluarkan pendapatnya di muka umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam konstitusi Indonesia diatur Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen kedua telah diatur , menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Maksudnya adalah setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat dalam bentuk ungkapan atau pernyataan di muka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dalam pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai spirit demokrasi itu sendiri.

Arus informasi serta komunikasi global telah mampu membangun suatu dimensi baru yang bertumpu pada demokrasi dan

Hak Asasi Manusia, sehingga menampilkan kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum yang terkadang dalam pelaksanaannya tanpa memindahkan aturan-aturan serta ketentuan yang berlaku dan bahkan diikuti dengan tindakan kekerasan atau anarkis yang akan dapat berubah menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Unjuk rasa merupakan bentuk luapan protes akibat dari masalah sosial, ekonomi dan politik yang tengah berlangsung, dan tempat yang dianggap paling kondusif terhadap lahirnya masalah-masalah tersebut adalah daerah perkotaan. Kesenjangan Sosial, ekonomi, dan politik jauh lebih menonjol di daerah perkotaan dari pada pedesaan, karena kota sebagai pusat dari segala aktifitas, mulai ekonomi, perdagangan, industri, keuangan, jasa, politik dan pemerintahan, pendidikan, rekreasi sampai pada pusat informasi serta budaya. Penghuni kota tentu mempunyai mobilitas yang tinggi, penuh dinamika dan pada akhirnya lebih responsif terhadap segala permasalahan yang timbul serta dirasakan mengganggu.

Seperti unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, buruh atau karyawan, sopir dan warga kampung. Unjuk rasa masyarakat ditenggarai muncul karena terdapat "Kegusuran". Kegusuran masyarakat karena melihat realitas yang begitu ambigu, misalnya; ketidakadilan sosial, ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil penguasa dan pemerintah, politik yang telah menjadi kurang bahkan tidak demokratis dan lain-lain merupakan sejumlah akar persoalan yang

kerap diperjuangkan. Unjuk rasa yang dilakukan buruh atau karyawan lebih disebabkan karena tidak terdapatnya keseimbangan antara harapan dan kenyataan yang terkombinasi dalam suatu kondisi dimana keadaan tersebut bisa diformulasikan sebagai bentuk kepuasan kerja rendah.²² Sopir tak akan segan-segan melakukan unjuk rasa yang dapat menjurus pada konflik bila terdapat kondisi yang mengganggu mereka untuk mendapatkan penumpang atau untuk mempertahankan jumlah perolehan penumpang. Contoh konkritnya, mereka lebih menyoroti pada upaya penanganan angkutan umum oleh pemerintah yang dianggap kurang serius, sehingga merugikan mereka misalnya persoalan pemberian ijin trayek baru. Warga kampung, terutama yang terutama yang termasuk kelompok marginal kota, dengan permasalahan seputar memerangi suasana ketidakadilan/ketimpangan pendistribusian alokasi sumber-sumber.

Unjuk rasa merupakan salah satu cara untuk menampakkan aspirasi ataupun pendapat masyarakat secara berkumpul. Secara umum, aktifitas ini memperlihatkan aktifitas ini memperlihatkan aktifitas ini memperlihatkan aspirasi atau pendapat tentang suatu perkara, cuma hal ini dilakukan oleh sekumpulan orang. Demokrasi yang dilakukan masyarakat pada hakekatnya adalah tuntutan moral yang ingin mengembalikan fungsi dan peran pemerintah sebagai wakil rakyat yang

²² Harian Umum Media Indonesia, *Op Cit.* hlm. 9

juga sekaligus pengambil keputusan yang menyangkut nasibnya, maupun sebagai pengawas yang efektif.

Ada beberapa alasan kenapa masyarakat lebih memilih unjuk rasa dalam menyampaikan aspirasinya yakni antara lain adanya ketidakpercayaan penanganan pemerintah atau penguasa dalam suatu perkara. Masyarakat menghendaki penanganan yang cepat dan tepat tetapi pemerintah atau penguasa terkesan lambat.

Dalam koridor format demokrasi sebagai sebuah jalan yang sesuai kodrat manusia merdeka untuk mencapai cita-citanya maka jelas dan terang unjuk rasa bukanlah perbuatan yang ilegal. Setiap orang berhak untuk menyampaikan segala pendapatnya. Sebagai negara yang menganut faham demokrasi maka sudah seharusnya pemerintah tidak terlalu panik dan resah ketika masyarakat atau sebagian dari elemennya berarak-arak turun ke jalan untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak seharusnya aparat lebih suka mencari dalam suatu unjuk rasa dari pada menampung dan mendengarkan aspirasi para pengunjuk rasa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Terhadap Tindakan Anarkis yang Dilakukan Oleh Para Pengunjuk Rasa (Studi Kasus di Polresta Padang)

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah unjuk rasa atau demonstrasi.

Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.²³ Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat secara bebas yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum sehingga akan menimbulkan tindakan anarkis yang akan banyak merugikan banyak pihak termasuk bagi yang melakukannya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan :

“ Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan

²³ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Sehingga dalam hal ini diperlukan peranan pihak kepolisian, sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, Menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat²⁴. Menurut Bapak Iptu Indra, tugas ini juga berlaku dalam mengamankan unjuk rasa atau demonstrasi. Artinya sepanjang unjuk rasa menyampaikan aspirasi dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis maka pihak kepolisian akan membiarkan para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya²⁵.

Selain itu, ada beberapa tugas pokok Polri yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi unjuk rasa yang sesuai dengan butir dalam Pasal 14 (1), yaitu Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum dan Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.

Dalam menyelenggarakan tugas seperti pada pasal 13 dan 14 diatas, maka Polri juga berwenang melakukan tindakan yang sesuai dengan butir di dalam pasal 15 jika terjadi tindakan anarkis yaitu Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian , Mengambil identitas serta memotret seseorang, Mencari keterangan dan barang bukti. Lalu sesuai dengan butir di dalam pasal 16 Polri

²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Iptu Indra, ,Polresta Padang ,pada tanggal 02 april 2012 , Pukul 10.45 WIB

juga berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dikatakan bahwa POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri²⁶. Di dalam melaksanakan tugas di lapangan POLRI sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau keadaan yang mendesak seperti halnya jika terjadi tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa, jika terjadinya anarkis polisi melakukan negosiasi terhadap koordinator lapangan, memberikan peringatan kepada nya agar tidak melakukan unjuk rasa yang anarkis, seandainya masih terjadi kekerasan atau anarkis dalam melakukan unjuk rasa polisi melakukan pembubaran paksa terhadap para aksi unjuk rasa, dan bisa juga melakukan peringatan tembakan senjata sebagai peringatan dan di usir dengan anjing polisi.²⁷ Sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati / menjunjung tinggi hak azazi manusia.

²⁶ Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia no 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian

²⁷ Hasil wawancara dengan ibu Gusniarti, Polresta Padang tanggal 09 Juli 2012 pukul 12.00

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari 6 tahap sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelakunya, yaitu; kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul dan kimia (antara lain gas air mata dan semprotan cabe) dan kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang dapat menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan yang dapat mengancam nyawa anggota POLRI atau masyarakat.

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, ketua lapangan atau koordinasi lapangan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian 3x24 jam sebelum aksi unjuk rasa tersebut dilakukan, adapun motifasi para pengunjuk rasa adalah untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasi rakyat yang terpendam karena takut akan efek yang akan terjadi pada dirinya apabila dia menyalurkan sendiri tanpa didampingi orang-orang yang berani berkata lantang di depan umum. Dasar hukum yang menentukan setiap unjuk rasa harus diberitahukan 3x24 jam adalah pasal 9 (1) yang berbunyi :

“Pemimpin atau penanggung jawab kelompok, pemberitahuan sebagaimana di maksud selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan

di mulai telah di terima oleh polri setempat, pemberitahuan secara tertulis”.

Unjuk rasa dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai spirit demokrasi negara Republik Indonesia. Unjuk rasa sering kali berujung anarkis karena masyarakat yang melakukan unjuk rasa tidak dapat mengontrol diri. Menurut Ibu Iptu Gusniarti Polresta Padang, Bagian Polri yang bertindak langsung dalam menyikapi tindakan anarkis para pengunjuk rasa , yaitu :²⁸

1. Sabara atau samapta

Menurut Bapak Briptu Hendria polresta padang, tugas dan peranan Sabara dalam menanggulangi unjuk rasa mempunyai fungsi preventif terhadap para demonstran. Sabara berada di posisi terdepan dan berhadapan langsung dengan para pengunjuk rasa tersebut. Mengingat bahwa Sabara mempunyai fungsi dan peranan untuk mengupayakan upaya preventif, maka Sabara mempunyai sistem operasi tersendiri dengan sikap simpatik dan arif dalam menghadapi amuk atau para demonstran tersebut maka Sabara memakai dua macam sistem operasi dalam menanggulangi unjuk rasa, yaitu:

- a. Bila masyarakat dalam melakukan unjuk rasa melakukan pengrusakan atau pelemparan kantor atau pembakaran, maka para

²⁸ Wawancara Dengan Ibu Iptu Gusniarti ,Polresta Padang tanggal 02 april 2012 pukul 11.00 wib

aparatus keamanan tersebut melihat kalau jumlah para pengunjuk rasa tersebut lebih besar dari pada jumlah personel Polri, maka Polri tidak menangkap secara langsung pada saat itu juga, tetapi hanya memperhatikan dan mengontrol serta memperhatikan bentuk badannya, memakai baju apa dan sebagainya baru setelah beberapa jam kemudian atau baru ditangkap oleh petugas dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- b. Apabila jumlah masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut kurang daripada jumlah personel Polri maka para pelaku pengrusakan dan pembakaran pada saat melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, maka pada saat itu juga dapat ditangkap oleh anggota Polri kemudian dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.²⁹

2. Polantas

Polantas mempunyai peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan unjuk rasa, yaitu apabila masyarakat melakukan unjuk rasa di suatu lokasi yang padat dengan memakai jalur lalu-lintas maka untuk menghindari terjadinya kemacetan tugas polantas adalah mengatur rute lalu lintas selama berlangsungnya kegiatan unjuk rasa tersebut dengan tujuan demi kelancaran lalu-lintas dan kelancaran jalannya kegiatan unjuk rasa sehingga tidak menghambat kegiatan lainnya.

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Briptu Hendria ,polresta padang tanggal 02 april 2012 pukul 12.00 wib

3. Reserse

Reserse mempunyai fungsi sebagai represif atau menindak. Maksudnya masyarakat di dalam melakukan kegiatan unjuk rasa jika melakukan pengrusakan, pembakaran, dan penjarahan, pembunuhan yang mengganggu keamanan masyarakat maka tugas dan wewenang reserse adalah untuk menindak secara tegas demi keamanan dan ketertiban masyarakat di lokasi yang menjadi sasaran unjuk rasa masyarakat. Jadi, reserse atau polri pada umumnya diberi wewenang penuh secara tegas, siapapun yang melakukan tindak pengrusakan maka polri berhak menindak secara tegas dengan prosedur hukum yang berlaku.

4. Intelpam

Intel bertugas untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman yang terjadi dan mengamankan masyarakat selama unjuk rasa berlangsung.

Menurut Bapak Iptu Indra,SH Polresta Padang. Peranan Polri dalam pemerintahan atau negara adalah di bidang penegak hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta bimbingan ketentraman masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, peranan polri dalam menanggulangi unjuk rasa atau demonstrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab dari reserse, sabara, polantas dan intelpam saja tapi juga menjadi tugas dan

tanggung jawab Polri secara komprehensif karena sangat berhubungan dalam mengatasi para pengunjung rasa serta kegiatan masyarakat lainnya.³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan fungsi Polri sebagai pengayom masyarakat maka yang menjadi peranan Polri dalam menaggulangi unjuk rasa adalah merupakan tugas pokok dari Polri secara keseluruhan.

Selain sistem operasi yang dilakukan oleh Polri sebagaimana terurai di atas, maka ada pula beberapa sistem operasi yang dilakukan oleh Polri yaitu apabila adanya suatu laporan dari masyarakat bahwa pada tanggal sekian akan dilakukan kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi yang sudah dilengkapi dengan persyaratan yang harus dilengkapi dengan syarat-syarat laporan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Jika demikian Polri wajib menerima surat izin dari penanggung jawab pengunjung rasa tersebut sebelum satu hari dimana kegiatan unjuk rasa berlangsung.

Dengan demikian kepada pimpinan instansi pemerintah atau instansi swasta harus menerima rencana kegiatan unjuk rasa masyarakat tersebut untuk berdialog secara damai dan tertib guna untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang terbaik guna untuk kepentingan kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan, Polri sebagai pengayom masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk menjaga atau mengawasi masyarakat di tempat atau dimlokasi kegiatan unjuk rasa berlangsung.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Indra ,polresta padang tanggal 02 april 2012
pukul 10.00 wib

B. Bentuk-Bentuk Tindakan Anarkis yang Dilakukan Oleh Para Pengunjuk Rasa

Berdasarkan data lapangan yang penulis peroleh dari POLRESTA Padang, selama tahun 2012 ada beberapa kasus aksi unjuk rasa yang terjadi di kota Padang. Ada yang berlangsung damai, dan adapula yang berakhir dengan tindakan anarkis

Unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis, yaitu unjuk rasa untuk menentang rencana pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Para pengunjuk rasa yang berjumlah ± 1200 orang ini adalah mahasiswa yang berasal dari Lingkar Mahasiswa Minangkabau Raya (Lima Mira). Lima Mira merupakan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di Sumatera Barat seperti BEM Universitas Andalas, BEM Universitas Negeri Padang dan BEM Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumbar. Aksi unjuk rasa ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 di tiga lokasi di kota Padang, yaitu di halaman Kantor Gubernur Sumbar, di depan gedung Bank Indonesia (BI) Jalan Sudirman dan di gedung DPRD Sumatera barat Jalan Khatib Sulaiman Padang

Aksi unjuk rasa yang dimulai dari pukul 10.00 WIB ini semula berjalan damai, namun berakhir dengan tindakan anarkis dari para mahasiswa, yaitu dengan pelemparan batu ke gedung DPRD Sumatera Barat dan pengrusakan terhadap pos jaga polisi di simpang Didong. Tindakan ini dipicu oleh Para Petugas yang berusaha membubarkan mahasiswa dengan senjata gas air mata dan *Amor Water Canon* (AWC). Petugas membubarkan mahasiswa karena telah

melewati izin waktu untuk berunjuk rasa yang direncanakan berakhir pada pukul 17.00 WIB, namun hingga pukul 18.00 WIB para mahasiswa ini belum juga mengakhiri aksinya. Unjuk rasa ini berakhir dengan penahanan 8 orang mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan pelemparan batu terhadap gedung DPRD. Para mahasiswa ini dibebaskan setelah dimintai keterangan dan membuat surat perjanjian dengan didampingi oleh keluarganya.

Selain aksi unjuk rasa diatas, ada 11 aksi unjuk rasa yang berlangsung di kota Padang yang berakhir dengan damai. Dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Tabel Kasus Unjuk Rasa
POLRESTA Padang Tahun 2012

No	Kejadian Dan Tuntutan	Tempat Unjuk Rasa	Jumlah Pengunjuk Rasa	Tindakan Yang Diambil
1.	Aksi unjuk rasa Penyampaian Aspirasi Damai Warga Padang Cinta Damai, Rabu tanggal 4 Januari 2012 pukul 10.00 WIB	Di Lantai II Ruang Rapat Gedung Balai Kota Padang dan DPRD Kota Padang.	± 40 Orang	Wakil Ketua DPRD Padang AFRIZAL, SH mengadakan pertemuan di ruang Pers room dan menjelaskan bahwa proses perluasan lahan sebanyak 412 Hektar oleh PT Semen Padang sedang dilakukan pengajian RTRW yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan RI melalui usulan Gubernur Sumbar terhadap perubahan status hutan lindung

				menjadi hutan produksi.
2	Aksi Unjuk rasa dari SP (Serikat Pekerja) PT. PLN wilayah Sumbar Cabang Padang. Kamis tanggal 5 Januari 2012 pukul 10.00 WIB	Di PT. PLN wilayah Sumbar cabang Padang.	±100 Orang	Mendengarkan serta menyalurkan aspirasi
3.	Aksi unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Sijunjung (IMAS) Kota Padang tentang kematian tahanan di Mapolsek Sijunjung. Selasa tanggal 10 Januari 2012 pukul 10.15 WIB	Polda Sumbar dan DPRD kota Padang	± 20 Orang	Mendengarkan dan menerima dukungan serta aspirasi IMAS.
4.	Aksi unjuk rasa masyarakat Seberang Palinggam Padang ke Kantor Lurah Seberang Palinggam Padang mengenai dana bantuan stimulan tahun 2011, Senin tanggal 16 Januari 2012 pukul 10.30 WIB	Kantor lurah seberang Palinggam	± 40 Orang	PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kerja) Kota Padang akan melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat seberang Palinggam yang belum mendapatkan dana bantuan stimulan tahun 2012 akan dibekukan.
5.	Aksi unjuk rasa dari Forum anak nagari Teluk Kabung terhadap proyek pembangunan PT.PLTU Teluk Sirih, Kamis	Di Proyek Pemabanguna PLTU Teluk Sirih Padang	±250 Orang	PLTU Teluk Sirih menyepakati tuntutan Forum Anak Nagari

	tanggal 26 Januari 2012 pukul 09.00 WIB			
6.	Aksi unjuk rasa oleh karyawan/sopir tangki PT. Elnusa Pertamina Teluk Kabung Padang di pintu masuk Head BBM Pertamina Teluk Kabung Padang mengenai pemberhentian karyawan karena urinenya mengandung narkoba, Selasa tanggal 24 Januari 2012, pukul 07.30	Diruang serbaguna PT. Elnusa Pertamina Teluk Kabung Padang	±40 Orang	PT. Elnusa Pertamina Teluk Kabung Padang akan melakukan tes urine kembali terhadap 5 orang karyawan yang telah dipecat.
7.	Aksi unjuk rasa mahasiswa Unand BP 2009 tentang proses pindah dan sanksi DO bagi mahasiswa Unand angkatan 2009, Senin 30 Januari 2012, pukul 08.30 WIB	Di Gedung Auditorium Unand	± 600 orang	
8.	Aksi unjuk rasa mahasiswa UNAND BP 2009 tentang proses pindah dan sanksi DO bagi mahasiswa UNAND angkatan 2009 di Kantor DPRD Prov. Sumatera Barat dan Kantor Komnas HAM, Selasa tanggal 31 Januari 2012, pukul 10.10 WIB.	Di Kantor DPRD Prov. Sumatera Barat dan Kantor Komnas HAM	± 600 orang	

9.	Aksi Unjuk Rasa Aliansi Lingkar Mahasiswa Minangkabau Raya (LIMAMIRA), pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012, pukul 12.15 WIB.	Di bundaran hadis didong dan Kantor DPRD Prov. Sumatera Barat	± 30 orang	
10.	Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam forum mahasiswa Universitas Andalas Limau Manis Padang, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012, pukul 08.45 WIB	Di pintu gerbang masuk kampus Unand	± 200 orang	
11.	Aksi penyampaian orasi oleh mahasiswa STAIN Bukittinggi dan STAIN Batusangkar tentang pelaksanaan sidang Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 22 Februari 2012 pukul 15.55 WIB.	Di depan kantor Pengadilan Negeri Padang Jl. Khatib Sulaiman No. 80 Kec Padang Utara.	± 300 orang	

Sumber : Polresta Padang 2012

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dari data di atas semuanya rata-rata memberitahukan aksi unjuk rasanya secara tertulis kepada pihak Polresta Padang. Menurut Ibuk iptu gusniarti polresta padang. Dalam menyampaikan aspirasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan tidak boleh lepas dari koridor tersebut. Hal ini harus diperhatikan oleh para pengunjuk rasa, sebab negara Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu

semua tindakan atau perbuatan selama melakukan unjuk rasa harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³¹

Dalam penyampaian aspirasi para pengunjuk rasa tidak boleh melakukan perbuatan anarkis dan merusak barang-barang atau melempar-lempar batu dan sebagainya. Kalau terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa, maka pihak Polresta Padang akan mengambil tindakan dan mengusut perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya pelaku dimintai keterangannya dan selanjutnya ditangkap dan diproses, jika perlu dilakukan penahanan terhadap si pelaku.

Selanjutnya Ibuk Iptu Gusniarti Polresta Padang, mengatakan bahwa untuk melakukan unjuk rasa atau demonstrasi oleh mahasiswa atau masyarakat terlebih dahulu harus meminta izin secara tertulis kepada Polresta Padang dalam waktu 3x24 jam, yang gunanya untuk mempersiapkan anggota Sabara yang akan mengamankan aksi protes atau penyampaian pendapat tersebut, gunanya adalah untuk mengantisipasi kebrutalan dan anarkis dari pengunjuk rasa.³²

Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 yang bunyi rumusannya adalah pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada POLRI selambat-lambatnya 3x24 jam seperti yang diatur dalam Pasal 9 (1) No. 9 Tahun 1998 yang berbunyi:

³¹ Hasil Wawancara dengan Ibuk Iptu Gusniarti Polresta Padang tanggal 02 April 2012 pukul 11.00 wib

³² Hasil Wawancara Dengan Ibuk Iptu GusGusniarti Polresta Padang, tanggal 02 April 2012 pukul 11.00 wib

“Pemimpin atau penanggung jawab kelompok, pemberitahuan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan di mulai telah diterima oleh polri setempat, pemberitahuan secara tertulis”.

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas maka penerapan dilapangan menurut Bapak Brigadir Ogi Marla Polresta Padang, Undang-Undang No.9 Tahun 1998 ini pada dasarnya baik untuk menjamin pedoman bagi Polresta Padang dan memberikan koridor-koridor untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mengeluarkan pendapat dimuka umum.³³

Namun kalau ditinjau dari prosedurnya kurang optimalnya masyarakat memahami akan ketentuan hukum tentang unjuk rasa atau demonstrasi ini, alasannya adalah karena:

1. Pihak masyarakat tidak mau melaporkan kepada pihak kepolisian karena dianggap berpihak kepada instansi yang menjadi sasaran unjuk rasa atau demonstrasi tersebut. Pihak kepolisian berhak membubarkan aksi unjuk rasa tersebut.
2. Masyarakat tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Syarat-Syarat dan Bentuk Penyampaian Pendapat Dimuka Umum, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi undang-undang tersebut kepada masyarakat luas oleh pemerintah.

³³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Brigadir Ogi Marla , Polresta padang tanggal 02 april 2012 pukul 11.30 wib

4. Adanya persepsi masyarakat bahwa dengan adanya zaman reformasi ini merasa sebebas-bebasnya tanpa memahami koridor-koridor yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam melakukan kegiatan unjuk rasa tersebut melakukan pengrusakan, pelemparan rumah, toko yang pada hakikatnya menimbulkan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat yang terdapat di Kota Padang.

5. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.³⁴

Selanjutnya beliau juga mengatakan untuk mengatasi unjuk rasa peranan Polri sangat diperlukan, yaitu:

- a. Sebagai pengaman dalam unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Sebagai penegakan hukum dalam hal-hal yang menyimpang. Dalam hal ini Polri menjaga adanya pihak-pihak yang melakukan propokasi dalam unjuk rasa dan hal ini biasa dilakukan Polri secara terbuka dan tertutup. Maksudnya terbuka yaitu dengan menggunakan baju seragam lengkap dan membikin pro sedangkan tertutup maksudnya dengan menggunakan baju preman. Misalnya unjuk rasa dilakukan oleh masyarakat dengan baik atau dilakukan oleh masyarakat yang tidak jelas yang menyebabkan terjadi propokasi sehingga menimbulkan benturan-benturan dan inilah yang harus dijaga oleh Polri.

³⁴ *ibid*

Sedangkan dari pihak Polri dengan adanya keadaan masyarakat sebagaimana yang terurai di atas maka keadaan dan peranan Polri bersifat fleksibel artinya Polri tetap memegang teguh aturan hukum yang berlaku selaku penegak hukum tetapi Polri juga memberikan toleransi kepada masyarakat pengunjuk rasa sala jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengganggu ketentraman dari seluruh masyarakat.

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut di dalam masyarakat kurang optimal serta kurang adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat khususnya para pengunjuk rasa yang enggan untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.

Apabila masyarakat melakukan kegiatan unjuk rasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau secara tiba-tiba yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 maka Polri berhak membubarkan para pengunjuk rasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun demikian operasional Polri dapat memberikan toleransi kepada para pengunjuk rasa sepanjang tidak melakukan tindakan anarkis atau pengrusakan di lokasi yang menjadi sasaran unjuk rasa. Polri mengambil tindakan jika terjadi pelemparan atau pengrusakan yang mengganggu ketertiban masyarakat luas.³⁵

³⁵ .Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Indra, polresta padang tanggal 02 april 2012 pukul 10.00 wib

Salah satu yang melatarbelakangi memberikan toleransi kepada para pengunjuk rasa karena Polri dapat membubarkan para pengunjuk rasa pada saat kegiatan unjuk rasa berlangsung bahkan ujung-ujungnya akan menimbulkan bentrokan antara Polri dengan pengunjuk rasa. Dengan demikian bukan berarti Polri tidak melakukan pengamanan terhadap para pengunjuk rasa pada saat kegiatan unjuk rasa berlangsung tapi gunanya menghindari timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dan Polri dalam rangka menanggulangi unjuk rasa berlangsung tidak secara netral sebagai bukti perwujudan bahwa Polri sebagai pengayom masyarakat komprehensif.³⁶

Apabila terjadi unjuk rasa masyarakat secara besar-besaran yang melebihi kekuatan atau jumlah personil Polri yang membahayakan keamanan umum masyarakat maka Polri dapat meminta bantuan pada personil satuan Brimob untuk menambah kekuatan personil Polri dalam menghadapi para pengunjuk rasa.

Dalam rangka menanggulangi unjuk rasa Polri dapat menggunakan beberapa fasilitas atau sarana. Fasilitas yang dimaksud adalah:

1. Menggunakan mobil penyemprotan (milik Brimob). Dengan hal tersebut dapat menghalangi atau membubarkan para pengunjuk rasa.
2. Menggunakan senjata yaitu senjata yang berisikan peluru karet atau berisikan gas semprotan.
3. Menggunakan pentongan

³⁶ *ibid*

4. Menggunakan kaca anti peluru yang gunanya adalah untuk melindungi diri para personil polri dari lemparan-lemparan batu atau benda-benda lain.
5. Selain itu polri menggunakan berbagai jenis fasilitas lain seperti kendaraan baik roda dua maupun roda empat terutama truk-truk besar milik dinas Polri maupun milik TNI atau Brimob yang mengangkut personil Polri ke tempat atau lokasi dimana unjuk rasa itu berlangsung.³⁷

Tabel 2
Unjuk Rasa Yang Terjadi Di Kota Padang
Setelah Diundangkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998

No	Tahun	Diberitahukan	Tidak diberitahukan	Jumlah
1.	2009	6	-	6
2.	2010	9	-	9
3.	2011	8	-	8
4.	2012	12	-	12

Sumber : Polresta Padang 2012

Berdasarkan tabel di atas maka jumlah unjuk rasa yang terjadi di kota Padang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah sebanyak 35 kali dan dalam melakukan unjuk rasa para pengunjuk rasa terlebih dahulu memberitahukan kepada Polresta Padang.

³⁷ .*ibid*

C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kepolisian Dalam Mengamankan Tindakan Unjuk Rasa

Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam melaksanakan tugasnya di bedakan dalam dua bagian yaitu :³⁸

1. Secara Interen

Adapun hambatan-hambatan secara interen adalah :

- a. Banyaknya keluhan-keluhan Polri karena kurang atau sangat terbatasnya sarana dan prasarana seperti kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat sehingga efeksifitas dalam operasional tugas Polri dalam menanggulangi unjuk rasa serta kegiatan keramaian masyarakat lain yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, kurang mendukung secara maksimal.
- b. Jumlah personil polri yang sangat terbatas, bila dibandingkan dengan jumlah masyarakat di Kota Padang.

2. Secara Eksteren

Hambatan-hambatan secara eksteren adalah :

- a. Masyarakat tidak mau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sehingga kadang-kadang dalam melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi tanpa mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang ini.

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibuk Iptu GusGusniarti Polresta padang , tanggal 02 april 2012 pukul 11.00 wib

- b. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.
- c. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sehingga sebagian masyarakat belum memahami benar tentang syarat-syarat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
- d. Masyarakat heterogen. Maksudnya masyarakat Kota Padang lebih banyak pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga adanya perbedaan kebudayaan dan adat istiadat.
- e. Kurang adanya koordiansi antara penanggung jawab yang merupakan perwakilan dari kelompok para pengunjung rasa atau demonstran tersebut dengan Polri sehingga langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Polri dalam rangka pengamanan pada saat kegiatan unjuk rasa berlangsung kurang jelas.³⁹

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa hambatan yang dimaksud diatas karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan sedangkan dari Polri yaitu terbatasnya jumlah personil dan tidak memadainya sarana dan prasarana.

³⁹ *ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan POLRI dalam tindakan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat serta penjaga keamanan maka dalam mengamankan unjuk rasa atau demonstrasi harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Artinya sepanjang menyampaikan aspirasi tersebut dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis maka pihak kepolisian akan membiarkan para demonstran itu menyampaikan aspirasinya. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan tersebut, maka ketua lapangan atau koordinasi lapangan harus memberitahukan kepada pihak kepolisian 3x24 jam sebelum aksi tersebut dilakukan.
2. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran dalam unjuk rasa/demonstran adalah akan memproses secara hukum si pelaku dan kalau terbukti melakukan penganiayaan akan ditahan dan selanjutnya diminta keterangan tentang seputar penganiayaan yang telah dilakukan, selanjutnya dibuatkan P21 dan diserahkan kepada kejaksaan. Sebagai penegak hukum dalam hal-hal yang menyimpang, dalam hal ini polri menjaga adanya pihak-pihak yang melakukan provokasi dalam unjuk rasa dan hal ini biasa dilakukan polri secara terbuka dan

tertutup maksudnya terbuka yaitu dengan menggunakan baju seragam lengkap dan membikin pro sedangkan tertutup maksudnya dengan menggunakan baju preman.

Sedangkan dari pihak polri dengan adanya keadaan masyarakat sebagaimana terurai diatas maka keadaan dan peranan polri bersifat fleksibel artinya polri tetap memegang teguh pada aturan hukum yang berlaku selaku penegak hukum tetapi polri juga memberikan toleransi pada masyarakat pengunjuk rasa asal jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengganggu ketentraman dari seluruh masyarakat.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggapi tindakan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat adalah:

- a. Secara Interen

Adapun hambatan secara interen adalah :

- 1) Banyaknya keluhan-keluhan polri karena kurang atau sangat terbatasnya sarana dan prasarana seperti kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat sehingga efektifitas dalam operasional tugas polri dalam menangani unjuk rasa atau demonstrasi serta kegiatan keramaian masyarakat lain yang bertentangan dengan

peraturan hukum yang berlaku kurang mendukung secara maksimal.

- 2) Jumlah personil polri yang sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang melakukan unjuk rasa.

b. Secara Ekstern

Hambatan-hambatan secara ekstern adalah :

- 1) Masyarakat tidak mau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga kadang-kadang dalam melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang ini.
- 2) Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.
- 3) Kurangnya sosialisasi Undang-undang No. 9 tahun 1998 sehingga sebagian masyarakat belum memahami benar tentang syarat-syarat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
- 4) Taraf pendidikan masyarakat masih rendah
- 5) Masyarakat heterogen, maksudnya masyarakat yang melakukan unjuk rasa lebih banyak pendatang dari

berbagai wilayah di Indonesia, sehingga adanya perbedaan kebudayaan dan adat istiadat.

- 6) Kurang adanya koordinasi antara penanggung jawab yang merupakan perwakilan dari kelompok para pengunjung rasa atau demonstran tersebut dengan Polri sehingga langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Polri dalam rangka pengamanan pada saat kegiatan unjuk rasa berlangsung kurang jelas.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah supaya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 kepada masyarakat luas agar masyarakat tau tata cara menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa agar tidak anarkis.
2. Disarankan kepada para Pengunjuk rasa agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan tindakan anarkis.
3. Disarankan kepada pemerintah agar dapat menambah jumlah personil Polri dan melengkapi sarana dan prasarana yang diturunkan pada saat unjuk rasa yang dapat mengantisipasi tindakan anarkis.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Bibit Samat Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta
- Dedy Djamaludin Malik, 1998, *Gejolak Reformasi Menolak Anarki*, Zaman Wacana Mulia, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Kunarto, 1999, *Merenungi Kiprah Polri Menghadapi Gelora Anarki 2*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1987, *Pembahasan KUHP*, Sinar Grafika, Bandung.
- Pius Partanto, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkolo: Surabaya
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

C. Website

www.google.pustaka.otonomis.org/asal-kata-anarkisme.com, Diakses tanggal 11 Januari 2012

www://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme, Diakses Tanggal 11 Januari 2012

www.google.com/ *kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum*, Diakses tanggal 11 januari 2012.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 310 /XIII/D/FHUK- RM/ 2012

Tentang

Panitia/Tim Penguji Ujian Sarjana Hukum Lengkap (Komprehensif) Strata I
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri Strata I bernama **WAHYU FEBRIO N** No.BP **07940121** telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum Lengkap (Ujian Komprehensif)
b. Bahwa untuk penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada sub a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Menteri No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum
4. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 443 /VIII/A/Unand-2002 tanggal 01 April 2002 tentang Kurikulum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas
5. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 836/XIV/Unand-2005 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Hukum Universitas Andalas
6. Keputusan Rektor Unand No. 883/III/A/Unand-2010 tanggal 28 September 2010 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini :

1. Prof.Dr.Yuliandri, SH.,MH	: Penanggungjawab
2. Apriwal Gusti, SH	: Wakil
3. Yoserwan, SH.,MH.,LLM	: Koordinator
4. Prof.Dr.Ismansyah,SH.MH	: Ketua Pelaksana
5. Melwitis,SH.MH	: Sekretaris
6. Hj.Aria Zurnetti,SH.MHum	: Penguji
7. Yusrida,SH.MH	: Penguji
8. Prof.Dr.Ismansyah,SH.MH	: Pembimbing I
9. Hj.Efren Nova,SH.MH	: Pembimbing II

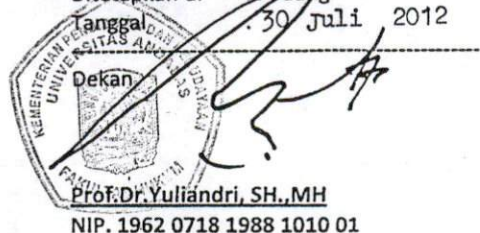
Sebagai Panitia/Tim Ujian Sarjana Hukum Lengkap Strata Satu (S1) atas nama :

Nama : **WAHYU FEBRIO NANDA**
Nomor BP : **07940121**
Prog.Kekhususan : **Hk.Pidana**
Hari/Tgl : **Rabu / 1 Agustus 2012**
Jam/Tempat : **10.30-11.30 wib / Jl.Pancasila No.10 Padang**
Judul Skripsi : **Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Tindak Anarkis Oleh Masyarakat yang dst**

Kedua : Biaya Pelaksanaan Ujian dimaksud dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2012

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 30 Juli 2012


Prof.Dr.Yuliandri, SH.,MH
NIP. 1962 0718 1988 1010 01

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Bagian di Lingkungan Fakultas Hukum Unand

7. Kejadian Unjuk Rasa

Kejadian Unjuk Rasa bulan Januari 2012 : 8 Kasus

Uraian Kasus Unjuk Rasa bulan Januari 2012 :

1. Aksi unjuk rasa Penyampaian Aspirasi Damai Warga Padang Cinta Damai (WPCD) dalam rangka pelaksanaan ulang tahun ke 2 WPCD.

Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012, pukul 10.00 Wib, bertempat di Lantai II Ruang Rapat Gedung Balai Kota Padang telah berlangsung penyampaian aspirasi damai WPCD dengan mengadakan pertemuan dengan pihak Pemerintah kota Padang.

Pada pertemuan ini diikuti oleh pihak Pemko Padang dan anggota peserta WPCD yang berjumlah ± 40 (empat puluh orang), yang terdiri:

- a. Walikota Padang DR. H. FAUZI BAHAR, I-Isi
- b. Wakil Walikota Padang H. MAHYELDI ANSYARULLAH, SP
- c. Sekretaris Daerah kota Padang Ir. EM ZALMI
- d. Ketua WPCD kota Padang ALDI YUNALDI, SH, Msi
- e. Pengurus Inti WPCD kota Padang
- f. Simpatisan/anggota WPCD kota Padang

Pada pukul. 11. 00 wib, aksi orasi WPCD dilanjutkan di Kantor DPRD kota Padang Jl.Sawahan No.50 Kec.Padang Timur kota Padang, pada aksi ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD kota Padang AFRIZAL, SH dengan mengadakan pertemuan di Ruang Pers Room Gedung Baru DPRD kota Padang, pada pertemuan ini ketua WPCD kota Padang juga menyampaikan aspirasi yang sama kepada Wakil Ketua DPRD kota Padang Padang, Wakil Ketua DPRD kota Padang menjelaskan yang mana pada proses perluasan lahan sebanyak 412 Hektar oleh PT Semen Padang hal ini sedang dilakukan pengajian RTRW yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan RI melalui usulan Gubernur Sumatera Barat terhadap perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi.

Pada pukul. 11.45 wib, pelaksanaan penyampaian orasi damai WPCD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke 2 yang jatuh pada tanggal 04 Januari 2012 berakhir, situasi dalam keadaan aman dan terkendali

2. **Telah Berlangsungnya Unjuk Rasa Dari SP (Serikat Pekerja) PT PLN Wilayah Sumatera Barat Cabang Padang..**

Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 pukul 10.00 Wib di kantor PLN Wilayah Sumatera Barat telah berlangsung unjuk rasa dari SP (Serikat Pekerja) PT PLN Wilayah Sumatera Barat Cabang Padang yang dipimpin oleh koordinator lapangan An. **H. ARDI** (Ketua SP PT PLN Wil. Sumbar) dengan masa berjumlah \pm 100 orang.

Aksi tersebut diawali dari penyampaian aspirasi ke kantor PT. PLN Wilayah Sumbar dengan masa berjumlah \pm 100 orang. Pada pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut ada 4 tuntutan diantaranya :

- a. Menolak Debirokratisasi PLN. Cab. Padang
- b. Menolak sistim ujian on line
- c. Menolak Pemberangusan terhadap Serikat Pekerja
- d. Permasalahan Boipartid Serikat Pekerja .

Aksi tersebut berakhir pada pukul 15.00 Wib, situasi aman dan terkendali.

3. **Aksi unjuk rasa dari ikatan mahasiswa Sijunjung (IMAS) Kota Padang tentang kematian tahanan di Mapolsek Sijunjung.**

Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 pukul 10.15 wib telah berlangsung aksi unjuk rasa dari ikatan mahasiswa Sijunjung (IMAS) Kota Padang tentang kematian tahanan di Mapolsek Sijunjung.

Dalam aksi tersebut yang bertindak sebagai korlap **An. HERU ASMAN**, dan diikuti oleh 20 orang mahasiswa yang tergabung dalam IMAS (ikatan mahasiswa Sijunjung). diterima langsung oleh:

1. Kabidkum Polda Sumbar **AKBP BUSRIZEN**
2. Kabidhumas Polda Sumbar **AKBP MAINHAR SUGIARTO**
3. Kabiddokes Polda Sumbar **AKBP HARJUNO**.

Adapun pernyataan sikap dari IMAS menyayangkan terjadinya kematian tahanan di Polsek Sijunjung dan menuntut Kapolda Sumbar untuk:

1. Mengusut tuntas kasus kematian dua tahanan anak di Polsek Sijunjung.
2. Memproses secara hukum oknum Polsek Sijunjung yang bersalah dalam kematian tahanan.

Pada pukul 11.10 wib para peserta aksi melanjutkan aksi di depan gedung DPRD Provinsi dan di terima langsung oleh Ketua Komisi DPRD Prov. Sumatera Barat antara lain:

1. Ketua Komisi I **An. MUSLIM M NUR**
2. Anggota komisi I **An. ZULKIFLI JAILANI**
3. Anggota komisi I **SRIL KUSUMA**
4. Anggota komisi I **ARTATI**

Dalam aksi unjuk rasa dari ikatan mahasiswa Sijunjung (IMAS) Kota Padang tentang kematian tahanan di Mapolsek Sijunjung mereka melakukan aksi teaterikal, dan membawa spanduk yang menyatakan bahwa:

1. ditahan bukan untuk mati
2. Stop kekerasan dalam tahanan
3. Tahanan juga manusia
4. Usut tuntas kematian dua tahanan anak di Polsek Sijunjung.

aksi unjuk rasa dari ikatan mahasiswa Sijunjung (IMAS) Kota Padang berakhir pada pukul 11.50 Wib dan mahasiswa meninggalkan gedung DPRD dalam keadaan aman dan terkendali.

4. Aksi unjuk rasa masyarakat Seberang Palinggam Padang ke Kantor Lurah Seberang Palinggam Padang mengenai dana bantuan Stimulan tahun 2011.

Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 pukul 10.30 Wib di Kantor Lurah Seberang Palinggam Padang telah berlangsung kegiatan unjuk rasa dari masyarakat Seberang Palinggam Padang mengenai kejelasan dana bantuan stimulan tahun 2011.

Kegiatan unjuk rasa tersebut diterima oleh:

- ASNUL Z.A (Ketua PJOK Kota Padang)
- SYAMSUL BAHRI (Lurah Seberang Palinggam Padang)

Dalam kegiatan unjuk rasa dari masyarakat Seberang Palinggam tersebut dengan massa ± 40 orang dan koordinator lapangan NELA WATI menuntut agar Ketua PJOK (penanggung jawab operasional kerja) Kota Padang segera merealisasikan dana bantuan stimulan tahun 2011.

Menurut Keterangan masyarakat, dana tersebut merupakan program dari Kementrian Perumahan yang bernama program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dengan 2 katagori bantuan yaitu:

- Rumah tidak layak huni mendapat bantuan Rp 5.000.000,-
- Tanah kosong (rumah kayu tidak layak huni) mendapat bantuan Rp 10.000.000,-

Kegiatan unjuk rasa masyarakat seberang palinggam Padang dengan Ketua PJOK Kota Padang selesai pukul 11.45 Wib dengan kesepakatan antara masyarakat Seberang Palinggam dengan PJOK Kota Padang yaitu PJOK Kota Padang akan melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat Seberang Palinggam yang belum mendapatkan dana bantuan stimulan tahun 2011 dan untuk sementara dana bantuan stimulan tahun 2012 akan dibekukan. Selama berlangsungnya kegiatan situasi aman dan terkendali

5. Aksi Unjuk Rasa dari Forum Anak Nagari Teluk Kabung terhadap Proyek Pembangunan PT. PLTU Teluk Sirih..

Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 pukul 09.00 Wib di Proyek Pembangunan PT. PLTU Teluk Sirih Padang telah berlangsung kegiatan unjuk rasa dari Forum Anak Nagari Teluk Kabung.

Kegiatan unjuk rasa tersebut diterima oleh:

- Ir. ARIF AMIRUDDIN (Project Manager)
- PRIHAMBODO (GM PT. Rekin)
- USMAN (Kabag safety PT. Rekin)
- ERICK (Site Manager PT. Rekin)
- SUYONO (Konsultan PT. PLN Persero)

Dalam kegiatan ujuk rasa dari Forum Anak Nagari Teluk Kabung tersebut menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

- Kami mendukung PLTU Teluk Sirih, tapi tolong kembalikan silih jahiah.
- Prioritaskan tenaga kerja anak Nagari Teluk Kabung (tenaga kerja yang disiapkan setelah PLTU Teluk Sirih Berdiri)
- Untuk memasok barang dan jasa melalui Nagari Teluk Kabung
- Selesaikan tanah tower dan libatkan ninik mamak
- Ukur ulang kemhali tanah lokasi PLTU Teluk Sirih

- Tanah dan bangunan disekitar PLTU Teluk Sirih agar dilaporkan kepada ninik mamak/KAN Teluk Kabung

Dari jumlah massa \pm 250 orang, perwakilan PT. PLTU Teluk Sirih meminta dari beberapa perwakilan untuk melakukan dialog, diantaranya:

- SUHAILI ARSYAD (Ketua KAN Teluk Kabung)
- YAZIRMAN MURAD (Ketua Forum Anak Nagari)
- DASRIL MALIN KAYO (Ketua LPM Teluk Kabung Utara)
- HARMAINI (Ketua LPM Teluk Kabung Timur)
- BASRUL (Ketua LPM Teluk Kabung Selatan)
- Perwakilan masyarakat Teluk kabung Utara 4 orang
- Perwakilan masyarakat Teluk kabung Selatan 3 orang
- Perwakilan masyarakat Teluk kabung Timur 5 orang
- Perwakilan mahasiswa Bungus Teluk Kabung

Kegiatan ujuk rasa dari Forum Anak Nagari Teluk Kabung selesai pukul 14.00 Wib dengan kesepakatan antara Forum Anak Nagari dengan PLTU Teluk Sirih yang sesegera mungkin dipenuhi oleh pihak PLTU Teluk Sirih. Selama berlangsungnya kegiatan situasi aman dan terkendali.

6. Aksi Unras Oleh Karyawan/Sopir Tangki PT. Elnusa Petrofin Pertamina Teluk Kabung Padang di Pintu Masuk Head BBM Pertamina Teluk Kabung Padang.

Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012, pukul 07.30 wib bertempat di Pintu Masuk Head BBM Pertamina Teluk Kabung Padang telah berlangsung Aksi Unras Oleh Karyawan/Sopir Tangki PT. Elnusa Petrofin Pertamina Teluk Kabung Padang. Pelaksanaan aksi berlangsung dengan peserta aksi berjumlah 40 (empat puluh orang), selanjutnya perwakilan aksi sebanyak 8 (delapan) orang yang merupakan karyawan yang diberhentikan oleh PT. Elnusa Petrofin Pertamina Teluk Kabung melakukan mediasi dengan Pimpinan PT. Elnusa Petrofin Pertamina Teluk Kabung An. EDI P. HOLONGAN yang diperantarai oleh Kapolsek Bungus AKP. ZULKAFDE, SH, yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna PT. Elnusa Petrofin Pertamina Teluk Kabung.

Dari hasil pertemuan dan mediasi tersebut menyampai beberapa kesepakatan, yang antara lain:

- a. Pihak perusahaan/pimpinan PT. Elnusa Petrofin Pertamina Teluk Kabung akan menyampaikan keinginan 5 (lima) orang karyawan yang diberhentikan karena positif urinenya terkandung narkoba ke pimpinan pusat dan hasilnya akan disampaikan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012.
- b. Pelaksanaan kembali pemeriksaan urine kepada 5 (lima) orang karyawan tersebut di RS.Bhayangkara Padang, dan ke 3 (tiga) orang karyawan lain yang diberhentikan hal ini sudah merupakan keputusan perusahaan karena dianggap memiliki kinerja yang tidak baik.

Pada pukul. 09.00 wib, pelaksanaan aksi unjuk rasa karyawan PT. Elnusa Petrofin Pertamina Teluk Kabung Padang berakhir, selanjutnya operasional PT. Elnusa Petrofin Pertamina Teluk Kabung Padang berjalan seperti semula situasi dalam keadaan aman dan terkendali.

7. Aksi unjuk rasa mahasiswa UNAND BP 2009 tentang proses pindah dan sanksi DO bagi mahasiswa UNAND angkatan 2009 di gedung Auditorium UNAND Limau manis Padang.

Pada hari senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 08.30 wib telah berlangsung aksi unjuk rasa mahasiswa UNAND BP 2009 tentang proses pindah dan sanksi DO bagi mahasiswa UNAND angkatan 2009 sesuai dengan surat edaran No. 655/UN16/PP/2012 di gedung Auditorium UNAND Limau manis Padang.

Dalam aksi tersebut yang bertindak sebagai korlap **An. ILHAM** dan 600 orang peserta unjuk rasa tersebut di terima langsung oleh:

1. **Drs. H. WERRY DARTA TAIFUL. SE.MA** (REKTOR)
2. **Prof. Ir. FEBRIAN ANAS ISMAIL. MT** (Pembantu rektor III)
3. **Prof. DR. NOFESAR DJAMARUM. MS** (Pembantu rektor I)

Adapun beberapa tuntutan dari forum musyawarah mahasiswa universitas andalas (Formus UNAND) antara lain:

1. Sistem ICT Portal yang bermasalah
 - salah satunya terdapat nilai ganda (nilai awal yang dinilai rendah dan nilai hasil perbaikan mata kuliah yang sama) sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif (IPK) karena kedua nilai termasuk ke dalam bilangan pembagi.

2. Jadwal kuliah dan praktikum yang dempet dan juga pada jadwal libur juga sering dilakukan praktikum.
3. Tidak berjalannya proses bimbingan dan pembinaan dari PR III, PD III, dan Dosen PA kepada mahasiswa khususnya kepada mahasiswa yang terkendala masalah akademis.
4. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai.
5. Tidak adanya sistem remedial di UNAND pada beberapa fakultas di UNAND, maka sistem remedial harus di berlakukan secara keseluruhan.

Aksi unjuk rasa tersebut berakir pada pukul 11.15 Wib dan mahasiswa kembali ke fakultas masing-masing situasi terdapat dalam keadaan aman dan terkendali.

8. Aksi unjuk rasa mahasiswa UNAND BP 2009 tentang proses pindah dan sanksi DO bagi mahasiswa UNAND angkatan 2009 di Kantor DPRD Prov. Sumatera Barat dan Kantor Komnas HAM Sumbar.

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 10.10 wib telah berlangsung aksi unjuk rasa mahasiswa UNAND BP 2009 yang tergabung dalam Forum Musyawarah Mahasiswa Universitas Andalas tentang proses pindah dan sanksi DO bagi mahasiswa UNAND angkatan 2009 sesuai dengan surat edaran Mahasiswa UNAND BP 2009 yang tergabung dalam Forum Musyawarah Mahasiswa Universitas Andalas diterima oleh anggota DPRD Prov. Sumbar komisi IV Bidang pendidikan yaitu :

- **APREL TASMAN** (Anggota Komiri IV DPRD. Prov. Sumbar)
- **SITI IZATI AZIZ** (Anggota Komisi IV DPRD. Prov. Sumbar)
- **SYUKRIADI SYUKUR** (Anggota Komisi IV DPRD. Prov. Sumbar)

Adapun beberapa tuntutan dari forum musyawarah mahasiswa universitas andalas (Formus UNAND) antara lain:

1. Meminta kepada DPRD Sumbar untuk menampung aspirasi mahasiswa Unand yang terkena sanksi DO akademis.
2. Sistem ICT Portal yang bermasalah salah satunya terdapat nilai ganda (nilai awal yang dinilai rendah dan nilai hasil perbaikan mata kuliah yang sama) sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif (IPK) karena kedua nilai termasuk ke dalam bilangan pembagi.

3. Jadwal kuliah dan praktikum yang dempet dan juga pada jadwal libur juga sering dilakukan praktikum.
4. Tidak berjalannya proses bimbingan dan pembinaan dari PR III, PD III, dan Dosen PA kepada mahasiswa khususnya kepada mahasiswa yang terkendala masalah akademis.
5. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai
6. Tidak adanya sistem remedial di UNAND pada beberapa fakultas di UNAND, maka system remedial harus di berlakukan secara keseluruhan.



8. Gangguan Bencana Alam

Gangguan bencana alam bulan Januari 2012 : - Kasus

9. Kasus Menonjol Bulan Januari 2012

Kasus Menonjol bulan Januari 2012 adalah sebagai berikut :

a. Pencurian dengan pemberatan	: 62	Kasus
b. Curanmor	: 98	Kasus
c. Pencurian dengan kekerasan	: 20	Kasus
d. Penganiayaan berat	: 3	Kasus
e. Kebakaran	: 1	Kasus
f. Pembunuhan	: -	Kasus
g. Perkosaan	: 1	Kasus
h. Penipuan	: 36	Kasus
i. Pengrusakan	: 15	Kasus
j. Narkoba	: 2	Kasus
k. Judi	: -	Kasus
Jumlah / Total	: 238	Kasus

7. Kejadian Unjuk Rasa

Kejadian Unjuk Rasa bulan Februari 2012 : 4 Kasus

Uraian Kasus Unjuk Rasa bulan Februari 2012 :

1. Aksi Simpatik LSM Nurani Perempuan di Depan Halte Sendik BRI Pasar Baru Pauh Padang.

Pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2012, pukul. 10.30 wib di Depan Halte Sendik BRI Pasar Baru Kel. Cupak Tengah Kec. Pauh Kota Padang telah berlangsung aksi simpatik yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang tergabung dalam LSM Yayasan Zilla Nisaa Nurani Perempuan Women's Crisis Center dengan tema "Perkosaan, kenali dan tanggani, Korlap An.YEFRI.

Dalam aksi ini dilaksanakan pembagian kertas dan stiker yang bertuliskan "Aku Bukan Pelaku Perkosaan" dan membentangkan sebuah spanduk ukuran 3 x 1,5 meter untuk meminta dukungan tanda tangan, selain itu membentangkan pamflet yang bertuliskan:

- a. Katakan tidak pada perkosaan.
- b. Pelaku perkosaan perbuatan biadab.
- c. Hukum seberat beratnya pemerkosa.

Pada Pukul. 11.00 wib, aksi simpatik berakhir dengan ditutup pesan dari Korlap An.YEFRI yaitu meminta kepada perempuan untuk selalu waspada, hindari diri dari segala kekerasan perkosaan, Laporkan diri pada pihak berwajib atau lembaga layanan terdekat, situasi dalam keadaan aman dan tertib.

2. Aksi Unjuk Rasa Aliansi Lingkar Mahasiswa Minangkabau Raya (LIMAMIRA) di Bundaran Hadis Didong dan Kantor DPRD Prov. Sumatera Barat.

Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 pukul 12.15 Wib berlangsung aksi unjuk rasa Aliansi Lingkar Mahasiswa Minangkabau Raya (Lima Mira) di bundaran Hadis Didong dan kantor DPRD Prov. Sumatera Barat. Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh ± 30 (tiga puluh) orang mahasiswa yang di koordinatori oleh **PUTRA RAMANDA**.

Aksi unjuk rasa ini dimulai dari kampus UBH Ulak Karang dan melakukan longmarch ke bundaran Hadis Didong. Peserta aksi membawa perlengkapan sebagai berikut :

1. Spanduk yang bertuliskan "Lawan Rezim Komprador SBY-BOEDIONO, Lawan penjajah gaya baru, lawan segala bentuk pemecah belahan gerakan mahasiswa dan lawan segala intervensi pada gerakan mahasiswa.
2. Bendera Lima Mira, bendera UBH, Bendera ITP dan bendera BEM-Nusantara.
3. Toa Pengeras suara
4. Ban bekas.

Dibundaran Hadis Didong Mahasiswa melakukan orasi dan memberikan selebaran kepada pengguna jalan yang melintas. Adapun tuntutan mahasiswa yang tertuang dalam selebaran tersebut merekomendasikan kepada seluruh anggota BEM-Nusantara beserta dengan kaum buruh, tani dan elemen lainnya untuk bersama – sama :

1. Lawan Rezim Komprador SBY-BOEDIONO.
2. Lawan Penjajahan Gaya Baru
3. Lawan Segala Pemecah Belahan Gerakan Mahasiswa.
4. Lawan Segala Intervensi Pada Gerakan Mahasiswa.

Mahasiswa kemudian membakar ban bekas di bundaran dan membakar photo Presiden RI SUSILO BAMBANG YUDHONONO serta photo Wakil Presiden RI BOEDIONO, sempat terjadi ketegangan akibat pembakaran tersebut namun situasi dapat diatasi. Kemudian Peserta aksi bergerak menuju gedung DPRD Prov. Sumatera Barat. Di gedung DPRD Prov. Sumatera Barat peserta aksi hanya melakukan pengucapan sumpah mahasiswa dan tidak melakukan orasi.

Pada pukul 14.30 wib seluruh peserta aksi meninggalkan gedung DPRD Prov. Sumatera Barat dengan tertib menuju kampus UBH. Secara umum aksi berlangsung dalam keadaan aman dan terkendali

3. Telah Berlangsung Aksi Penyampaian Aspirasi / Orasi oleh Mahasiswa STAIN Bukittinggi dan STAIN Batusangkar tentang Pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Korupsi.

Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekira Pukul 15.55 Wib di depan Kantor Pengadilan Negeri Padang Jl. Khatib Sulaiman No. 80 Kec. Padang Utara Kota

Padang telah berlangsung aksi Penyampaian Aspirasi / Orasi oleh Mahasiswa STAIN Bukittinggi dan ST/IN Batusangkar tentang Pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Korupsi terhadap ketua STAIN Bukittinggi **ISMAIL NOVEL** yang disangkakan telah melakukan korupsi uang Negara sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Dalam aksi ini di ikuti oleh 300 (tiga ratus) orang Mahasiswa dan Dosen STAIN dengan menggunakan 5 (lima) unit Bus yang dirental oleh pihak kampus dan membawa spanduk yang bertuliskan " Bebaskan Ketua STAIN Bukittinggi dari Kriminalisasi dan Politisasi Pendidikan ", yang mana dalam orasi ini para pengunjung rasa mengutuk Jaksa Penuntut Umum Bukittinggi yang terlambat hadir sehingga hakim memutuskan untuk menunda sidang sampai dengan minggu depan, dalam orasinya pengunjung rasa juga meminta kepada Hakim agar Ketua STAIN Bukittinggi **ISMAIL NOVEL** dibebaskan, karena mereka merasa ketua STAIN Bukittinggi tidak bersalah.

Pada pukul 18.10 wib penyampaian aksi berakhir dan para mahasiswa kembali menaiki Bus untuk kembali ke Bukittinggi dan Batusangkar

4. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam forum mahasiswa universitas andalas limau manis padang

Pada hari jum'at tanggal 24 februari 2012 sekira pukul 08.45 wib, bertempat dipintu gerbang masuk kampus unand telah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh 200 (duaratus) orang mahasiswa / I unand padang yang tergabung dalam forum musyawarah mahasiswa unand. Korlab an aulia rizal (fakultas teknik bp 2009).

Isi spanduk dan famplet antara lain :

a. Tuntutan :

- batalkan sanksi DO
- perbaiki system akademi unand
- perbaiki dan tingkatkan system keamanan
- batalkan uang pratikum difakultas non eksata

b. Pendidikan untuk semua

c. Saat uang jadi prioritas no 1 kemanusiaan nol

Setelah mahasiswa tidak bias bertemu dengan rector 3 prof. dr. H. Novesar Jamarun mahasiswa melanjutkan aksinya dengan longmarch menuju gedung convention guna menunggu rector unand Dr. H. Weri Darta Taifur, SE. MA. Akhirnya mahasiswa melakukan dialog di masjid nurul Ilmi dengan rector unand setelah dialo tidak menemukan titik terang mahasiswa melanjutkan aksinya dengan mengeluarkan statmen mereka merasa kecewa dan mengancam kebijakan rector unand.

Aksi berakhir pada pukul 11.30 wib dan mahasiswa mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar dan selanjutnya mahasiswa membubarkan diri ke fakultas masing – masing.

8. Gangguan Bencana Alam

Gangguan bencana alam bulan Februari 2012 : - Kasus

9. Kasus Menonjol Bulan Februari 2012

Kasus Menonjol bulan Februari 2012 adalah sebagai berikut :

a. Pencurian dengan pemberatan	: 113	Kasus
b. Curanmor	: 98	Kasus
c. Pencurian dengan kekerasan	: 24	Kasus
d. Penganiayaan berat	: 3	Kasus
e. Kebakaran	: 1	Kasus
f. Pembunuhan	: -	Kasus
g. Perkosaan	: 2	Kasus
h. Penipuan	: 38	Kasus
i. Pengrusakan	: 22	Kasus
j. Narkoba	: 11	Kasus
k. Judi	: 5	Kasus
<hr/> Jumlah / Total		: 317 Kasus



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 213 /UN16.4/KM-RM/2012

Padang, 19 Maret 2012

Lamp : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka

Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,
Sdr. Polresta Padang
di

Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

Nama : Wahyu Febrio Nanda
Nomor BP : 07940121
Prog Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri**
Alamat : Jl. Rambai No.24 Purus Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 19 Maret s/d 19 Juni 2012, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul " **PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN TINDAKAN ANARKIS OLEH MASYARAKAT YANG MELAKUKAN UNJUK RASA** " Pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I.



Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
- 3.Sdr. Pembimbing I dan II
- 4.Sdr.yang bersangkutan.
- 5.Pertinggal



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 213 /UN16.4/KM-RM/2012

Padang, 19 Maret 2012

Lamp. : -
Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kesbang Linmas Kota Padang
di
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

Nama : Wahyu Febrio Nanda
Nomor Bp : 07940121
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri**
Alamat : Jl. Rambai No.24 Purus Padang
Untuk melakukan : Penelitian Lapangan
Judul : **"PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENYELESAIKAN TINDAKAN ANARKIS OLEH MASYARAKAT
YANG MELAKUKAN UNJUK RASA"**
Waktu : 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas
sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu
dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

Yoserwan, SH, MH, LL.M
NIP. 1962-1231 1989 011 002.

Penugasan disampaikan kepada Yth.

Sdr. Rektor Universitas Andalas.
Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
Sdr. Pembimbing I dan II
Sdr. yang bersangkutan.
Pertinggal



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 06. 585 /Kesbang/2012

pala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

Dasar :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi

Penelitian

Surat dari PD I, Fakultas Hukum Reguler Mandiri UNAND

Nomor : 213/UN16.4/KM-RM/2012 tanggal 16 Maret 2012

Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 26 Maret 2012

ngan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di
ta Padang yang diadakan oleh :

Nama

: WAHYU FEBRIO NANDA

Tempat/Tanggal Lahir

: Pariaman, 19 Februari 1990

Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat di Padang

: Jl. Rambai No.24 Purus

Maksud Penelitian

: Penyelesaian Skripsi

Judul Penelitian/Survey/PKL

: Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Menyelesaikan Tindakan Anarkis Oleh
Masyarakat Yang Melakukan Unjuk Rasa.

okasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL :

- Polresta Padang

Waktu Penelitian

: 3 (tiga) bulan

Anggota Rombongan

: -

engan ketentuan sebagai berikut :

Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas
/Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL
serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol
dan Linmas.

Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan
ditinjau kembali.

Padang, 26 Maret 2012



iteruskan Kepada Yth.

Kapolresta Padang

PD I, Fakultas Hukum Reguler Mandiri UNAND

Yang bersangkutan

Pertinggal.



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 18 / IV / 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : WAHYU FEBRIO NANDA
NO.MAHASISWA : 07940121
PEKERJAAN : MAHASISWA
ALAMAT : JL.RAMBAI NO 24 PURUS PADANG

Berdasarkan Surat dari Universitas Andalas Fakultas Hukum Nomor : 213 / UN 16.4 /KM-RM / 2012 tgl 19 Maret 2012, tentang Permintaan bantuan mengadakan Penelitian di Polresta Padang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian / survey di Polresta Padang.

Demikianlah surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 10 April 2012

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG**

U.b. KABAG OPS

M. YUDIE SULISTIYO, Sik
KOMISARIS POLISI NRP. 76101102